

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Penduduk ialah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah dalam kurun waktu yang lama. Penduduk di suatu wilayah akan meningkat jumlahnya karena disebabkan oleh beberapa hal seperti kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), maupun perpindahan penduduk (migrasi). Ketiga hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya kepadatan penduduk yang mana dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk. Tingkat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi salah satunya disebabkan oleh angka kelahiran yang tak terkendali. Angka kelahiran yang tak terkendali akan menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional baik dari segi ekonomi maupun sosial, yang sebagai contohnya dapat menimbulkan pengangguran dan memperhambat pertumbuhan ekonomi (Nurandini, 2016).

Seorang ekonom bernama Thomas Robert Malthus mencetuskan teori yang berkaitan dengan kependudukan. Malthus mengatakan bahwa populasi penduduk cenderung meningkat secara alami pada deret geometris, sehingga banyak orang yang memilih untuk mengurangi hal tersebut agar tidak terjadi, yang disebut sebagai “*check*”. Malthus berpendapat bahwa guna memeriksa pertumbuhan penduduk dapat dilakukan secara efektif dengan menikah, menggunakan kontrasepsi hingga dalam keadaan yang membahayakan seperti peperangan, bencana alam dan wabah penyakit (Priyono, 2016). Dalam teorinya malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan melalui dua cara yaitu *positive check* dan *preventive check*. *Positive check* ialah pengendalian penduduk melalui kondisi yang ekstrim yang menyebabkan kematian, sedangkan *preventive check* ialah pengendalian penduduk melalui penekanan angka kelahiran (Ainy, 2019).

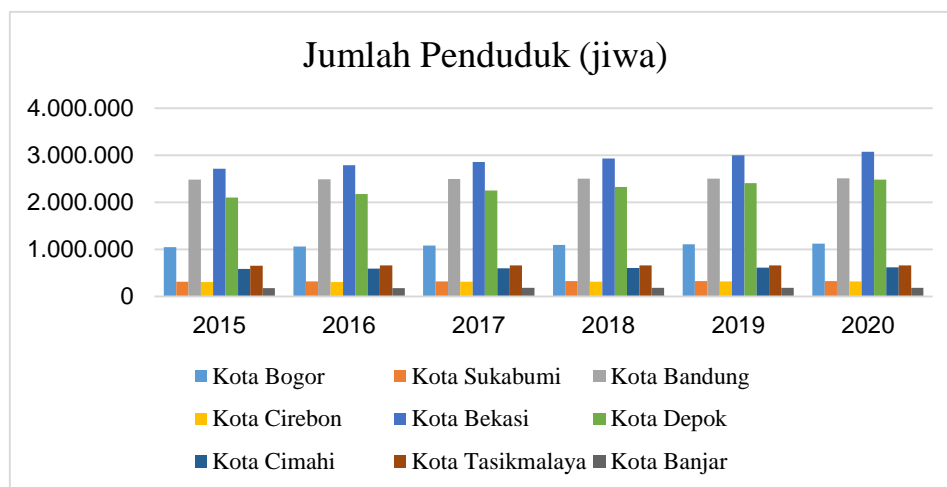
Seperti yang telah dijelaskan oleh malthus, *preventive check* merupakan pengendalian penduduk dengan cara pengendalian kelahiran yang diklasifikasikan melalui dua kategori yaitu pengekangan moral (*moral restraint*) dan keburukan (*vice*). Pengekangan moral dilakukan dengan cara tidak menikah, sedangkan

keburukan dilakukan dengan cara penggunaan kontrasepsi hingga aborsi (Lundquist et al., 2018).

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu wujud dari pengendalian penduduk menurut malthus yang mana dilakukan dengan cara penggunaan kontrasepsi. Keluarga berencana merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam bentuk kebijakan guna menekan laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk apabila tidak dicegah maka akan menimbulkan masalah sosial baru yang tentunya dapat menghambat pembangunan suatu wilayah (Nurandini, 2016). Hal ini sejalan dengan Undang Undang No.52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa keluarga berencana merupakan upaya mengatur jumlah kelahiran anak dan mengatur kehamilan guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menempati peringkat pertama dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Diketahui jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sebanyak 49.935.858 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021). Penduduk tersebut tersebar di 72 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas daratan sebesar 35,38 ribu kilometer persegi dengan kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Barat diketahui sebanyak 1.365 jiwa per kilometer persegi yang mana didominasi oleh penduduk usia produktif yang diketahui jumlahnya sebesar 70,68 persen dari seluruh penduduk di Provinsi Jawa Barat (Website Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021). Penduduk di Provinsi Jawa Barat bertambah sekitar 5,2 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun atau rata rata sebesar 0,44 juta jiwa tiap tahunnya. Diketahui pula laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,11 persen per tahun (Badan Pusat Statistik, 2021). Diantara 7 kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, terdapat satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak diantara kota lainnya ialah Kota bekasi, yang mana diketahui jumlah populasi penduduk di kota tersebut sebesar 2.543.676 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021).

**Grafik 1. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kota (jiwa) Tahun 2015 – 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2021

Berdasarkan grafik 1, jumlah penduduk Kota Bekasi meningkat secara signifikan dibandingkan kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan tersebut dipicu pula dengan jumlah kelahiran di Kota Bekasi yang cukup tinggi diantara kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang mana Kota Bekasi menempati posisi pertama dengan jumlah kelahiran tertinggi yaitu sebesar 46.126 jiwa pada tahun 2020 (Open Data Jabar, 2021). Penduduk kota bekasi diperkirakan akan membludak pada tahun 2022, hal ini diketahui melalui persentase laju pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi sebesar 4,2 persen per tahunnya, yang mana jauh lebih tinggi dari persentase laju pertumbuhan pendudukan nasional yang hanya 1,47 persen pertahunnya (Warsono, 2022). Tentu dengan tingginya pertumbuhan penduduk kota bekasi, akan menimbulkan dampak di berbagai bidang salah satunya bidang ekonomi yaitu akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM serta dibukanya lapangan pekerjaan baru, namun apabila hal itu tidak dilakukan maka akan menimbulkan masalah pengangguran hingga kemiskinan yang meningkat sehingga dapat menjadi beban baru bagi pemerintah Kota Bekasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

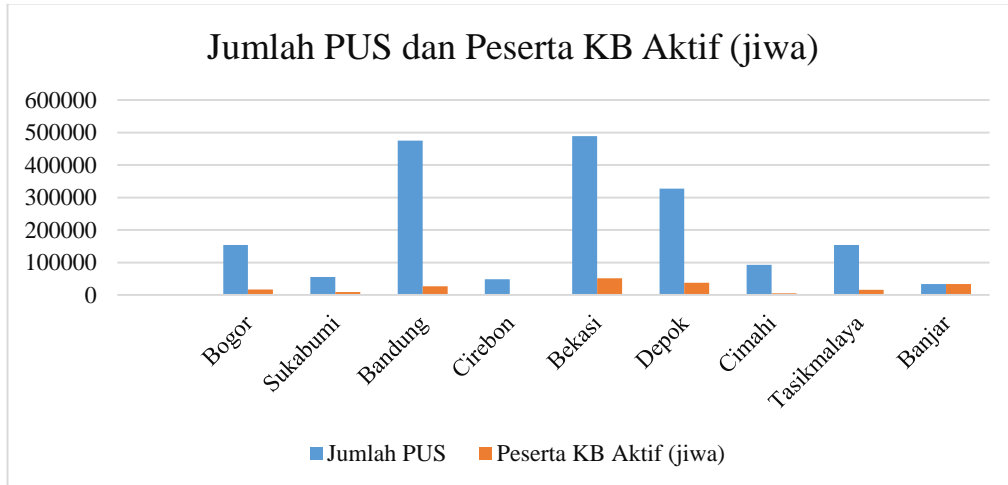
Melihat tingginya jumlah kelahiran di Kota Bekasi, upaya yang paling tepat ialah menekan angka kelahiran dengan menerapkan kebijakan melalui program keluarga berencana. Keluarga berencana adalah salah satu program pemerintah dalam berupaya untuk mengendalikan jumlah kelahiran guna mencapai keluarga

kecil yang berkualitas serta dapat meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kesehatan ibu dan anak (Harsoyo & Sulistyaningrum, 2018).

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang giat dalam melaksanakan program KB. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya kantor UPTD yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Bekasi, dimana kantor tersebut nantinya digunakan sebagai sarana penyaluran informasi kepada warga mengenai program Keluarga Berencana (Prabowo, 2020). Dalam rangka melengkapi data kependudukan keluarga Kota Bekasi khususnya dalam program keluarga berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi juga melakukan pendataan keluarga yang diketahui targetnya sebanyak 548.847 Kepala Keluarga (Bekasi, 2021). Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi, dalam rangka memperingati hari kontrasepsi Internasional, memberikan pelayanan KB yang baik dan gratis untuk akseptor KB yang mana bertujuan untuk meningkatkan capaian program pembangunan keluarga pendudukan dan keluarga berencana (bangga kencana) yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani permasalahan kependudukan dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya kader dan akseptor KB yang juga diharapkan jumlah kader maupun akseptor KB dapat meningkat dengan harapan dapat mengendalikan angka pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Bekasi (Viva, 2021).

Implementasi dari program keluarga berencana untuk menekan angka kelahiran ialah penggunaan alat kontrasepsi yang mana sasaran utamanya adalah pasangan usia subur (PUS) (Apriani & Karmini, 2021). Pasangan Usia subur ialah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan usia sekitar 15 hingga 49 tahun (Mardhiah & Aminy, 2019)

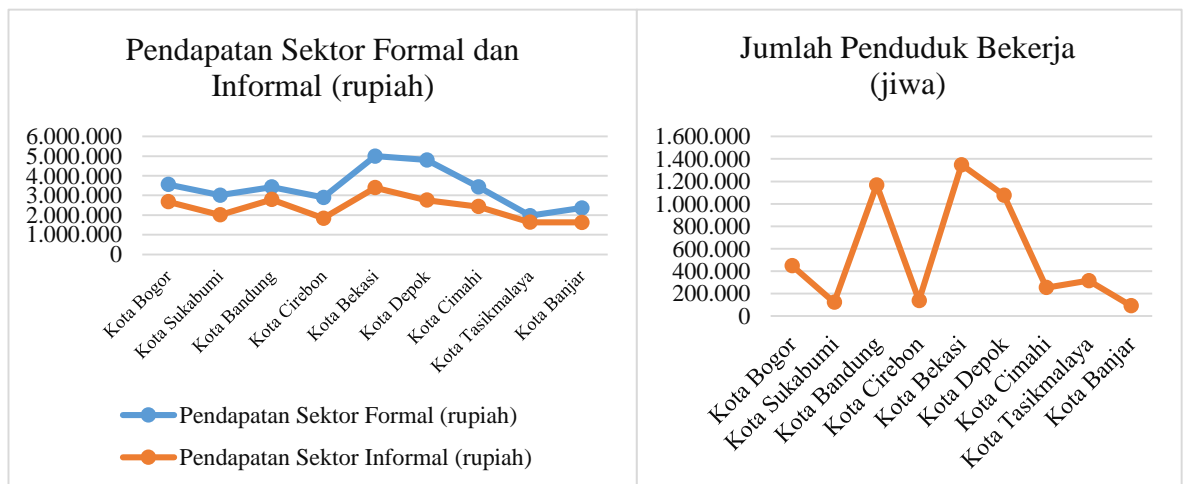
**Grafik 2. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) (jiwa) dan Peserta KB Aktif (jiwa) Berdasarkan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Berdasarkan grafik 2, Kota Bekasi menduduki posisi tertinggi dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 488.492 jiwa dan peserta KB aktif sebanyak 51.527 jiwa, tetapi jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah pasangan usia subur (PUS) dengan peserta KB aktif yang ada hanya 10 persen pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif. Secara persentase, angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Hal ini berkaitan pula dengan tingkat kelahiran, yang mana seharusnya dengan tingginya tingkat peserta KB aktif, maka tingkat kelahiran di Kota Bekasi dapat berkurang. Partisipasi pasangan usia subur dalam program KB dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor ekonomi, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

**Grafik 3. Rata Rata Pendapatan Sektor Formal, Rata Rata Pendapatan Sektor Informal (Rupiah) dan Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa) Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Kota Tahun 2020**

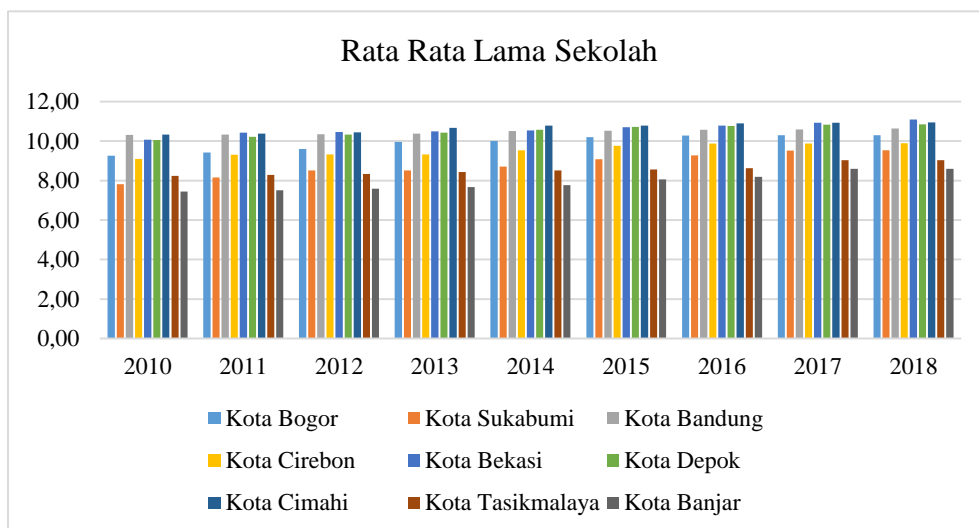


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2019

Berdasarkan grafik 3 diatas, Kota bekasi menempati posisi tertinggi pada jumlah penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 1.348.530 jiwa, pendapatan sektor formal tertinggi sebesar Rp.5.003.151 dan pendapatan sektor informal tertinggi sebesar Rp.3.396.894. Tingkat pendapatan mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi dalam program KB. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin mudah pula ia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana hal ini juga berlaku pada proses pemilihan kontrasepsi atau keikutsertaannya dalam program keluarga berencana (Jarroh, 2017), tetapi nyatanya dengan tingginya pendapatan yang diterima oleh penduduk kota bekasi, hal itu tidak mendorong diri mereka untuk mengikuti program KB. Pekerjaan merupakan salah satu latar belakang yang mempengaruhi keputusan seorang suami istri untuk memiliki anak, yang mana seorang suami istri bekerja rata rata memiliki jumlah anak lahir hidup sebanyak 2 anak pada setiap keluarga (Nurandini, 2016).

Selain tingkat pendapatan dan pekerjaan terdapat faktor lain yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam berpartisipasi dalam program KB, yaitu tingkat pendidikan. Kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh tingkat kesehatan, ditentukan pula oleh tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi seseorang pula dalam keputusannya untuk ikut serta dalam program keluarga berencana. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan memperluas wawasan betapa pentingnya mempunyai anak dari segi gizi, pendidikan maupun hal lainnya (Nurandini, 2016).

**Grafik 4. Rata Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 - 2018 Berdasarkan Kota**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2019

Berdasarkan grafik 4, Kota Bekasi mempunyai tingkat rata-rata lama sekolah paling tinggi di antara kota lainnya yang berada di Provinsi Jawa Barat, yang mana diketahui bahwa pada tahun 2018 tingkat rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi sebesar 11,09 tahun. Seperti yang diketahui bahwa rata-rata lama sekolah ialah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Hal ini berarti penduduk di Kota Bekasi menjalani pendidikan lebih lama dibandingkan penduduk kota lainnya. Seharusnya dengan tingginya rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi, tingkat partisipasi dalam program keluarga berencana di Kota tersebut juga tinggi, sebab pendidikan akan membuat seseorang berfikir rasional untuk mempertimbangkan keinginannya dalam menentukan jumlah anak sesuai dengan karir dan produktivitasnya (Panggabean, 2020). Pendidikan juga dianggap elemen yang sangat penting bagi seseorang dan akan menambah bekalnya dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin cepat produktivitasnya (Febrianty & Juliannisa, 2021).

Peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh faktor sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan terhadap partisipasi dalam program KB. Penelitian ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya dari (Nurandini, 2016) di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang membuktikan bahwa usia, tingkat pendidikan serta pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi seseorang ikut serta dalam program KB. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Apriani & Karmini, 2021) di Desa Jesiman Kertalangu juga membuktikan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap partisipasi seseorang ikut serta dalam program KB. Berdasarkan perbedaan pada penelitian sebelumnya serta latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI DALAM PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT”**.

## **II. Perumusan Masalah**

Kelahiran yang terjadi merupakan hal yang wajar, tetapi angka kelahiran yang terlalu besar dapat memperlambat pembangunan nasional serta menjadi tambahan beban baru untuk negara. Jumlah kelahiran di Indonesia masih terbilang tinggi yaitu 4,8 juta tiap tahunnya, hal ini menyebabkan Indonesia menempati posisi

ke-4 dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Pada awal tahun 2021, total kelahiran di Indonesia bertambah hingga 500.000 jiwa. Penyebab tingginya angka kelahiran tersebut ialah akibat dari terganggunya layanan penyedia kontrasepsi dan keluarga berencana. Selain itu, rendahnya akseptor KB dikalangan laki-laki juga menjadi permasalahan mengapa angka kelahiran kian meningkat. Hal tersebut disebabkan karena laki-laki hampir tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai program KB. Laki-laki mempengaruhi pasangannya untuk keputusan mau atau tidaknya mengikuti program Keluarga Berencana serta pilihan alat kontrasepsi.

Salah satu daerah yang dapat berpotensi menyumbang penduduk terbesar ialah kota Bekasi. Kota Bekasi menempati urutan pertama dibandingkan kota lainnya yang ada di Jawa Barat dengan jumlah kelahiran terbanyak di tahun 2020 yaitu sebesar 46.126 jiwa. Tingkat kelahiran di Kota Bekasi menempati posisi pertama diantara kota-kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, tetapi hal ini berlawanan dengan jumlah peserta KB Aktif di Kota Bekasi yang juga memiliki angka paling tinggi di antara kota-kota lainnya. Seharusnya dengan tingginya angka peserta KB maka tingkat kelahiran pun dapat mengalami penurunan. Penduduk kota Bekasi diperkirakan akan membludak pada tahun 2022, hal ini diketahui melalui persentase laju pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi sebesar 4,2 persen per tahunnya, yang mana jauh lebih tinggi dari persentase laju pertumbuhan penduduk nasional yang hanya 1,47 persen pertahunnya. Laju pertumbuhan penduduk yang terus menerus terjadi dapat menjadi permasalahan yang berkelanjutan setiap tahunnya yang dapat menimbulkan efek domino. Komposisi penduduk di Kota Bekasi di dominasi oleh penduduk usia produktif yang diketahui jumlahnya sebanyak 72,56% dan penduduk belum produktif yaitu sebesar 19,56%. Jika angka penduduk di tersebut dikaitkan dengan bonus demografi yang ditargetkan akan terjadi di 2030, maka dengan jumlah tersebut dapat dikatakan Kota Bekasi telah mengalami bonus demografi. Bonus demografi layaknya seperti dua mata pisau, bergantung pada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah memaksimalkan bonus demografi tersebut. Banyaknya jumlah penduduk sebenarnya bisa membawa dampak positif bagi Indonesia karena dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga meningkatkan produktivitas negara pada masa depan.



Menurut Thomas Robert Malthus, angka kelahiran dapat dicegah melalui *preventive check*. Implementasi dari cara tersebut ialah adanya program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran. Partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam program KB tentunya dipengaruhi oleh faktor sosial maupun ekonomi, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti ingin melihat permasalahan maupun variabel kunci yang dapat mendukung program KB sehingga terlaksana dengan baik dan menekan angka kelahiran.

### **III. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap partisipasi dalam program keluarga berencana di Kota Bekasi
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi dalam program keluarga berencana di Kota Bekasi
- c. Untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap partisipasi dalam program keluarga berencana di Kota Bekasi

### **IV. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya perihal pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap partisipasi program keluarga berencana di Kota Bekasi.

- b. Manfaat Teoritis

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, bahan evaluasi maupun gambaran untuk pemerintah mengenai

pengimplementasian kebijakan pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana di Kota Bekasi.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta pengetahuan masyarakat terkait kebijakan pemerintah dalam menangani masalah kependudukan melalui program keluarga berencana.